



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SERTA TUNJANGAN APARATUR
PEMERINTAH DUSUN (TAPD) SEBAGAI BAGIAN PENDAPATAN DUSUN
DALAM KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Dusun (ADD), bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) merupakan beberapa sumber pendapatan dusun yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) sebagai Bagian Pendapatan Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SERTA TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DUSUN (TAPD) SEBAGAI BAGIAN PENDAPATAN DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Dusun3

4. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
7. Alokasi Dana Dusun yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.
8. Alokasi Dana Dusun Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM, adalah 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD, yang dibagi secara merata untuk setiap dusun.
9. Alokasi Dana Dusun Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP, adalah bagian 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
10. Bobot Dusun adalah kebutuhan dana suatu dusun yang dihitung secara proporsional.

BAB II

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMERINTAHAN DUSUN

Bagian Pertama Penerimaan Dusun

Pasal 2

Bantuan keuangan yang diberikan kepada setiap dusun sebagai bagian pendapatan dusun dalam Kabupaten Bungo terdiri dari:

- a. bagian dusun dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang kemudian disebut dengan Alokasi Dana Dusun (ADD);
- b. bagian dusun dari bagi hasil pajak daerah;
- c. bagian dusun dari bagi hasil retribusi daerah;
- d. bagian dusun untuk Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD).

Pasal 3

Bantuan keuangan dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) dusun dalam Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan proporsionalitas.

Bagian Kedua Alokasi Dana Dusun (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD dan bagi hasil pajak yang diterima dusun tertentu, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ADD}_x &= \text{ADDM} + \text{ADDP}_x \\ \text{ADD}_x &= \text{Alokasi Dana Dusun untuk dusun } x \\ \text{ADDM} &= \text{Alokasi Dana Dusun Minimal yang diterima dusun} \\ \text{ADDP}_x &= \text{Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk dusun } x \\ \text{ADDP}_x &= \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM}) \end{aligned}$$

BD_x4

BD_x = Nilai Bobot Dusun untuk dusun x
ADD = Total Alokasi Dana Dusun untuk Kabupaten.
ΣADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Dusun Minimal

- (2) Bagian ADDM merupakan alokasi rata-rata untuk setiap dusun dalam Kabupaten Bungo sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
- (3) Bagian ADDP merupakan jumlah 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD setiap dusun, yang dialokasikan secara proporsional yang ditetapkan berdasarkan besaran nilai bobot masing-masing dusun dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

Keterangan:

BD_x = Nilai bobot dusun untuk dusun x
KV₁, KV₂, KV_{nx} = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya
a₁, a₂, a₃, ... a_n = angka bobot masing-masing Variabel

- (4) Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Dusun x (KV_{1x}, KV_x, ...):
- a. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) dusun, yang dimiliki oleh dusun untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, pendidikan, dan seterusnya.

b. Koefisien variabel dusun merupakan perbandingan antara angka variabel setiap dusun dengan jumlah variabel dusun.

c. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV_{1,2,\dots x} = \frac{V_{1,2,\dots x}}{\sum V_n}$$

KV_{1,2,...x} = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk dusun x. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Dusun Sejahtera, Nilai Variabel Pendidikan Dusun Sejahtera, dan seterusnya.

V_{1, 2,...x} = Angka Variabel Pertama, kedua, dan seterusnya untuk Dusun x. Misalnya : Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Tidak Lulus Pendidikan Dasar Dusun Sejahtera, dan seterusnya.

Σ V_n = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh dusun. Misalnya: Jumlah Kemiskinan Kabupaten A.

d. Angka Bobot masing-masing Variabel jika ditambahkan harus berjumlah 1 (satu)

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a₁, a₂, ..., a_n = Angka Bobot Variabel Pertama, kedua, hingga ke n. Misalnya : bobot Kemiskinan 0,4, bobot kesehatan 0,3, dan seterusnya dan jika dijumlahkan menjadi 1.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Retribusi dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD)

Pasal 5

- (1) Besaran Bagi Hasil Retribusi dibagi merata untuk setiap dusun dalam Kabupaten Bungo.
- (2) Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Perincian besaran dana untuk masing-masing dusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB III
PENGUNAAN DANA
Bagian Pertama
Alokasi Dana Dusun (ADD)

Pasal 7

Alokasi Dana Dusun (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf a dipergunakan untuk :

- a. Minimal 70% dari keseluruhan total dana ADD dipergunakan untuk menunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembiayaan Pelayanan Publik;
- b. Maksimal 30% dari total keseluruhan dan ADD dipergunakan untuk menunjang Kegiatan Operasional Pemerintahan Dusun dalam satu tahun anggaran.

Pasal 8

(1) Bagian minimal 70% dari keseluruhan total ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipergunakan untuk menunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembiayaan Pelayanan Publik diperuntukkan :

- a. Bantuan Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengadaan Infrastruktur seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah,-) pertahun.
- b. Bantuan Honorarium Pengelola Keuangan Dusun (Bendahara Dusun) yang bertanggung jawab terhadap seluruh penatausahaan pemasukan dan pengeluaran dusun dengan maksimal Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah,-) pertahun, dan apabila Bendahara dusun merangkap jabatan lain dalam struktur Pemerintahan Dusun maka honorarium hanya dapat dibayarkan maksimal 50% dari jumlah honor sebagai bendahara.
- c. Bantuan Honorarium guru ngaji, guru Mis dan pegawai syara' dengan rincian sebagai berikut :
 - Guru ngaji maksimal Rp. 200.000,- per orang per bulan (maksimal 3 orang per dusun).
 - Guru MIS maksimal Rp. 100.000,- per orang per bulan (maksimal 3 orang per dusun).
 - Pegawai Syara' maksimal Rp. 100.000,- per orang per bulan (Imam, Khatib dan Bilal untuk masjid yang menyelenggarakan Shalat Jum'at).
- d. Bantuan Honorarium untuk RT (Rukun Tetangga) maksimal Rp. 200.000,- per orang per bulan.
- e. Bantuan Honorarium untuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Dusun maksimal Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah,-) per tahun.
- f. Bantuan Honorarium untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.
- g. Bantuan Honorarium untuk TP-PKK Dusun maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah,-) per tahun.
- h. Bantuan Honorarium Kader Posyandu maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah,-) per tahun.

i. Bantuan.....6

- i. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, merupakan batas maksimal pembayaran dan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dusun dan disaat pelaporan pertanggungjawabannya terlebih dahulu diterbitkan Keputusan Rio sebagai dasar pembayaran serta dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Dusun (SPJ) sebagai bukti pembayarannya pada Triwulan I dan dilampirkan kembali pada triwulan berikutnya jika terjadi perubahan personil dalam satu Tahun Anggaran.
- j. Bantuan untuk belanja modal pengadaan infrastruktur seperti lahan, jaringan, prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pertanian dan perkebunan, prasarana pemasaran dan prasarana sosial dengan dana minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah,-) per tahun dan harus terlebih dahulu mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan bersamaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDusun).
- k. Bantuan belanja hibah kepada Karang Taruna maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah,-) pertahun yang pencairannya disesuaikan dengan kebutuhan dan proposal yang masuk ke Pemerintah Dusun.
- l. Bantuan belanja hibah kepada kelompok masyarakat dipergunakan untuk penanggulangan kemiskinan bagi keluarga kurang mampu maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah,-) pertahun dan diarahkan untuk bantuan modal usaha dan rehab ringan rumah tidak layak huni.
- m. Bantuan sosial untuk peningkatan Pendidikan Dasar Keagamaan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah,-) pertahun dan diarahkan untuk honor dan operasional Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrasah Diniyyah Awaliyah (MDA) dan sejenisnya.
- n. Bantuan sosial untuk operasional Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) dengan rincian sebagai berikut:
 - BPD dengan anggota 5 orang maksimal sebesar Rp. 200.000,- per bulan.
 - BPD dengan anggota 7 orang maksimal sebesar Rp. 225.000,- per bulan.
 - BPD dengan anggota 9 orang maksimal sebesar Rp. 250.000,- per bulan.
 - BPD dengan anggota 11 orang maksimal sebesar Rp. 275.000,- per bulan.Bantuan belanja tersebut dipergunakan antara lain untuk makan minum rapat, Alat Tulis Kantor (ATK), foto copy, perjalanan dinas dan sebagainya.
- o. Bantuan sosial untuk Kegiatan 10 Program Pokok PKK maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah,-) per tahun.
- p. Bantuan sosial Kegiatan Lomba Dusun tingkat kecamatan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah,-) per tahun. Bantuan dapat direalisasikan apabila kegiatan ini dilaksanakan oleh kecamatan.
- q. Bantuan sosial Pemilihan Rio maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah,-) pertahun yang dipergunakan untuk biaya sosialisasi, penjaringan calon, Alat Tulis Kantor (ATK), pencetakan surat suara, honorarium panitia pemilihan dan sebagainya (jika dalam tahun tersebut akan diadakan pemilihan Rio).
- r. Bantuan sosial untuk Pelantikan Rio maksimal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah,-) per tahun yang digunakan untuk prosesi Pelantikan Rio dan Pengukuhan Rio selaku Pemangku Adat Dusun (jika dalam tahun tersebut akan diadakan Pelantikan Rio).
- s. Bantuan sosial untuk penyelenggaraan kegiatan PHBN, PHBI dan MTQ ataupun sejenis maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tahun.

t. Bantuan.....7

- t. Bantuan pembentukan Karang Taruna dan kegiatan remaja ataupun sejenisnya maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pertahun dan pencairannya disesuaikan dengan kebutuhan dan proposal yang masuk ke Pemerintah Dusun.
 - u. Bantuan untuk penyusunan dan pengisian Buku Profil Dusun berupa bantuan pendataan, pengisian serta pencetakan Buku Profil Dusun maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah,-) per tahun.
 - v. Kegiatan Dusun lainnya dialokasikan sesuai dengan kesepakatan bersama BPD dan dituangkan dalam APBD Dusun.
- (2) Bagian maksimal 30% dari keseluruhan total ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b dipergunakan untuk menunjang Kegiatan Operasional Pemerintahan Dusun diperuntukkan untuk :
- a. Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD).
 - b. Biaya ATK, alat listrik & kebersihan kantor.
 - c. Foto copy & penggandaan.
 - d. Biaya Rapat.
 - e. Biaya tamu.
 - f. Biaya Perjalanan dinas dalam Kecamatan dan Kabupaten.
 - g. Biaya perjalanan dinas luar daerah (provinsi/luar provinsi) terdiri dari :
 - Transportasi pulang pergi (dengan kendaraan umum)
 - Bantuan BBM (jika memiliki kendaraan pribadi) minimal 3 orang penumpang.
 - Biaya penginapan dan uang saku.
 - h. Biaya jasa kantor seperti pembayaran tagihan telepon, PAM, Listrik, dan surat kabar, jasa penunggu/petugas pelayanan kantor.
 - i. Biaya perawatan kendaraan bermotor.
 - j. Biaya pembelian pakaian dinas, pakaian olah raga dan pakaian lainnya tertentu seperti pakaian adat.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 8

Bagian Dusun yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b dan Bagian Dusun yang bersumber dari Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c dipergunakan sebagai penyeimbang terhadap penggunaan Alokasi Dana Dusun (ADD) untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembiayaan Pelayanan Publik (minimum 70%) dan Kegiatan Operasional Pemerintahan Dusun (maksimum 30%) yang disesuaikan dengan Hasil Musyawarah Dusun dan dituangkan dalam APB Dusun.

Bagian Ketiga

Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD)

Pasal 9

Bagian Dusun untuk Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf d merupakan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Dusun yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

SANKSI.....8

SANKSI

Pasal 10

Sanksi diberlakukan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, dengan tujuan diajukan tidak lebih, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Dusun, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD). Sanksi tersebut dapat berupa :

- Sanksi masyarakat**, yaitu sanksi yang ditetapkan dalam musyawarah dusun, yang dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
- Sanksi hukum**, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan keputusan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- Sanksi program**, yaitu apabila dusun yang bersangkutan tidak mengelola dana bantuan dengan baik, seperti: menyalahi tujuan, sasaran, dan prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, tidak dipelihara atau tidak bisa dimanfaatkannya hasil pelaksanaan Alokasi Dana Dusun, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintah Dusun (TAPD), akan dimasukkan sebagai "lokasi bermasalah" yang dapat berakibat penundaan/pembatalan penyaluran dana tersebut.

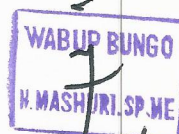
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berdaya laku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 - 4 - 2013



BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 - 4 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR .10

PERINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SERTA TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DUSUN (TAPD) SEBAGAI BAGIAN PENDAPATAN DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2013

5. TANAH SEPENGGAL2

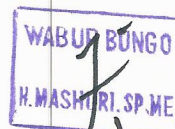
No.	KECAMATAN/DUSUN	RETRIBUSI	PAJAK	ADD	TAPD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
5.	TANAH SEPENGGAL					
1	Teluk Pandak	1,392,000	5,964,000	90,877,000	67,800,000	166,033,000
2	Empelu	1,392,000	5,917,000	89,672,000	80,400,000	177,381,000
3	Tanah Bekali	1,392,000	5,535,000	82,948,000	48,000,000	137,875,000
4	Pasar Lubuk Landai	1,392,000	5,934,000	88,931,000	57,000,000	153,257,000
5	Sungai Gambir	1,392,000	5,583,000	85,680,000	57,000,000	149,655,000
6	Candi	1,392,000	6,120,000	92,725,000	73,200,000	173,437,000
7	Tanjung	1,392,000	5,469,000	81,963,000	58,800,000	147,624,000
8	Pasar Rantau Embacang	1,392,000	5,383,000	80,674,000	48,000,000	135,449,000
9	Telentam	1,392,000	5,601,000	83,946,000	57,000,000	147,939,000
10	Tenam	1,392,000	5,392,000	78,805,000	57,000,000	142,589,000
6.	TANAH SEPENGGAL LINTAS					
1	Sungai mancur	1,392,000	5,710,000	85,577,000	53,400,000	146,079,000
2	Tanah Periuk	1,392,000	7,023,000	105,260,000	73,200,000	186,875,000
3	Lubuk Landai	1,392,000	7,266,000	108,892,000	53,400,000	170,950,000
4	Rantau Embacang	1,392,000	5,845,000	87,598,000	73,200,000	168,035,000
5	Tebing Tinggi	1,392,000	5,360,000	80,328,000	57,000,000	144,080,000
6	Paku Aji	1,392,000	5,478,000	82,094,000	48,000,000	136,964,000
7	Embacang Gedang	1,392,000	6,835,000	102,430,000	58,800,000	169,457,000
8	Sungai Puri	1,392,000	5,210,000	78,087,000	42,600,000	127,289,000
9	Pematang Panjang	1,392,000	5,041,000	75,557,000	62,400,000	144,390,000
10	Sungai Tembang	1,392,000	6,136,000	91,961,000	62,400,000	161,889,000
11	Sungai Lilin	1,392,000	5,983,000	86,675,000	57,000,000	151,050,000
12	Rantau Makmur	1,392,000	4,841,000	72,560,000	51,600,000	130,393,000
7.	BATHIN II BABEKO					
1	Tanjung Menanti	1,392,000	5,393,000	81,825,000	42,600,000	131,210,000
2	Simpang Babeko	1,392,000	6,915,000	103,628,000	48,000,000	159,935,000
3	Babeko	1,392,000	5,985,000	89,694,000	42,600,000	139,671,000
4	Sepunggur	1,392,000	6,765,000	101,384,000	48,000,000	157,541,000
5	Suka Makmur	1,392,000	5,374,000	80,039,000	51,600,000	138,405,000
6	Tuo Sepunggur	1,392,000	5,393,000	80,821,000	57,000,000	144,606,000
8.	RANTAU PANDAN					
1	Rantau Duku	1,392,000	6,418,000	96,182,000	67,800,000	171,792,000
2	Talang Sungai Bungo	1,392,000	5,463,000	81,868,000	42,600,000	131,323,000
3	Rantau Pandan	1,392,000	7,779,000	116,575,000	64,200,000	189,946,000
4	Leban	1,392,000	5,901,000	88,441,000	57,000,000	152,734,000
5	Lubuk Kayu Aro	1,392,000	5,567,000	83,426,000	51,600,000	141,985,000
6	Lubuk Mayan	1,392,000	5,113,000	76,625,000	57,000,000	140,130,000
9.	TANAH TUMBUH					
1	Pedukun	1,392,000	5,600,000	83,924,000	62,400,000	153,316,000
2	Lubuk Niur	1,392,000	5,468,000	81,949,000	57,000,000	145,809,000
3	Teluk Kecimbung	1,392,000	5,408,000	81,057,000	57,000,000	144,857,000
4	Rambah	1,392,000	5,687,000	85,239,000	57,000,000	149,318,000
5	Tebing Tinggi Uleh	1,392,000	5,727,000	85,835,000	62,400,000	155,354,000
6	Bukit Kemang	1,392,000	6,070,000	90,973,000	67,800,000	166,235,000
7	Panjang	1,392,000	5,559,000	83,315,000	57,000,000	147,266,000
8	Koto Jayo	1,392,000	5,661,000	84,839,000	57,000,000	148,892,000
9	Renah Jelmu	1,392,000	5,234,000	78,439,000	57,000,000	142,065,000
10	Perenti Luweh	1,392,000	5,490,000	82,279,000	57,000,000	146,161,000
11	Tanah Tumbuh	1,392,000	6,214,000	93,127,000	57,000,000	157,733,000

10. PELEPAT.....3

No.	KECAMATAN/DUSUN	RETRIBUSI	PAJAK	ADD	TAPD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
10.	PELEPAT					
1	Baru Pelepat	1,392,000	7,103,000	106,450,000	78,600,000	193,545,000
2	Dwi Karya Bakti	1,392,000	6,034,000	90,429,000	67,800,000	165,655,000
3	Rantau Kelayang	1,392,000	8,276,000	124,034,000	73,200,000	206,902,000
4	Balai Jaya	1,392,000	6,185,000	92,702,000	62,400,000	162,679,000
5	Rantel	1,392,000	5,287,000	79,238,000	51,600,000	137,517,000
6	Senamat	1,392,000	7,750,000	116,141,000	78,600,000	203,883,000
7	Sungai Beringin	1,392,000	6,105,000	91,495,000	51,600,000	150,592,000
8	Sungai Gurun	1,392,000	5,639,000	84,519,000	42,600,000	134,150,000
9	Batu Kerbau	1,392,000	7,835,000	117,415,000	64,200,000	190,842,000
10	Gapura Suci	1,392,000	7,128,000	106,830,000	42,600,000	157,950,000
11	Mulia Bakti	1,392,000	6,142,000	92,045,000	51,600,000	151,179,000
12	Mulia Jaya	1,392,000	5,952,000	89,203,000	57,000,000	153,547,000
13	Cilodang	1,392,000	6,892,000	103,296,000	51,600,000	163,180,000
14	Bukit Telago	1,392,000	4,768,000	71,453,000	51,600,000	129,213,000
15	Sekampil	1,392,000	5,156,000	77,273,000	51,600,000	135,421,000
11.	LIMBUR LUBUK MENGKUANG					
1	Tanjung Bungo	1,392,000	5,239,000	78,517,000	51,600,000	136,748,000
2	Tuo Lubuk Mengkuang	1,392,000	5,218,000	74,208,000	48,000,000	128,818,000
3	Pauh agung	1,392,000	5,582,000	83,656,000	57,000,000	147,630,000
4	Tuo Limbur	1,392,000	5,723,000	85,776,000	57,000,000	149,891,000
5	Renah Sungai Besar	1,392,000	5,515,000	82,649,000	48,000,000	137,556,000
6	Muara Tebo Pandak	1,392,000	5,983,000	89,666,000	57,000,000	154,041,000
7	Rantau Tipu	1,392,000	5,719,000	85,706,000	57,000,000	149,817,000
8	Baru Lubuk Mengkuang	1,392,000	5,200,000	77,929,000	48,000,000	132,521,000
9	Lubuk Tanah Terban	1,392,000	5,512,000	82,608,000	57,000,000	146,512,000
10	Pemunyan	1,392,000	5,889,000	88,262,000	57,000,000	152,543,000
11	Renah Sungai Ipuh	1,392,000	5,835,000	89,454,000	57,000,000	153,681,000
12	Tebo Jaya	1,392,000	5,592,000	85,812,000	57,000,000	149,796,000
13	Sekar Mengkuang	1,392,000	5,920,000	88,724,000	57,000,000	153,036,000
14	Limbur Baru	1,392,000	5,394,000	80,844,000	57,000,000	144,630,000
12.	BATHIN III ULU					
1	Muara Buat	1,392,000	6,199,000	92,905,000	62,400,000	162,896,000
2	Buat	1,392,000	6,166,000	92,407,000	53,400,000	153,365,000
3	Laman Pajang	1,392,000	5,450,000	81,678,000	48,000,000	136,520,000
4	Karak Apung	1,392,000	6,029,000	90,361,000	62,400,000	160,182,000
5	Timbolasi	1,392,000	6,398,000	95,893,000	53,400,000	157,083,000
6	Senamat Ulu	1,392,000	5,965,000	89,402,000	57,000,000	153,759,000
7	Aur Cino	1,392,000	5,694,000	85,342,000	51,600,000	144,028,000
8	Lubuk Beringin	1,392,000	5,222,000	78,256,000	42,600,000	127,470,000
9	Sungai Telang	1,392,000	7,154,000	107,221,000	62,400,000	178,167,000
13.	JUJAHAN ILIR					
1	Tepian Danto	1,392,000	6,170,000	92,463,000	57,000,000	157,025,000
2	Aur Gading	1,392,000	5,364,000	80,398,000	51,600,000	138,754,000
3	Pulau Batu	1,392,000	7,493,000	112,294,000	67,800,000	188,979,000
4	Bukit Sari	1,392,000	7,110,000	106,551,000	67,800,000	182,853,000
5	Sari Mulya	1,392,000	7,507,000	112,512,000	58,800,000	180,211,000
6	Lubuk Tenam	1,392,000	5,312,000	79,613,000	57,000,000	143,317,000
7	Kuamang	1,392,000	5,815,000	87,148,000	51,600,000	145,955,000
14.	RIMBO TENGAH					
1	Sungai Mengkuang	1,392,000	6,799,000	101,898,000	78,600,000	188,689,000
2	Sungai Buluh	1,392,000	5,779,000	85,557,000	53,400,000	146,128,000

15. BUNGO DANI.....4

No.	KECAMATAN/DUSUN	RETRIBUSI	PAJAK	ADD	TAPD	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
15.	BUNGO DANI					
1	Talang Pantai	1,392,000	6,219,000	93,206,000	57,000,000	157,817,000
2	Sungai Arang	1,392,000	6,396,000	94,860,000	64,200,000	166,848,000
3	Pulau Pekan	1,392,000	5,032,000	76,419,000	51,600,000	134,443,000
16.	BATHIN II PELAYANG					
1	Pelayang	1,392,000	6,675,000	99,031,000	62,400,000	169,498,000
2	Peninjau	1,392,000	6,073,000	91,020,000	62,400,000	160,885,000
3	Talang Silungko	1,392,000	5,235,000	78,463,000	53,400,000	138,490,000
4	Pulau Kerakap	1,392,000	6,171,000	93,552,000	67,800,000	168,915,000
5	Seberang Jaya	1,392,000	5,123,000	76,782,000	57,000,000	140,297,000
	JUMLAH TOTAL.....	196,272,000	845,065,000	12,663,990,000	8,213,400,000	21,918,727,000



BUPATI BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI